

**DIPLOMASI KEBUDAYAAN DALAM Mendukung Pencapaian  
Kepentingan Nasional dan Pertahanan Negara: Studi Program  
Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS) Oleh Kementerian  
Luar Negeri Republik Indonesia**

**CULTURAL DIPLOMACY IN SUPPORTING THE NATIONAL INTEREST AND  
NATIONAL DEFENSE: THE STUDY OF INDONESIA ARTS AND CULTURE  
SCHOLARSHIP PROGRAM BY THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR OF  
INDONESIA**

Gelar Nanggala W.S.P<sup>1</sup>, Makarim Wibisono<sup>2</sup>, Supartono<sup>3</sup>  
Prodi Diplomasi Pertahanan  
Fakultas Strategi Pertahanan  
Universitas Pertahanan  
(email : [gelarnanggalaz@yahoo.com](mailto:gelarnanggalaz@yahoo.com))

**Abstrak** – Situasi politik global cenderung bersifat dinamis. Setiap negara di dunia dituntut untuk selalu siap dalam mengambil tindakan demi memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tindakan setiap negara cenderung mengikuti tren dan situasi tataran global yang tengah terjadi. Untuk itu setiap negara dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi segala tantangan, termasuk potensi ancaman. Bentuk ancaman pun kini menunjukkan pergeseran, dari ancaman tradisional yang bersifat militer, menjadi ancaman nontradisional yang lebih kompleks. Dalam menyikapi bentuk ancaman-ancaman tersebut Indonesia memiliki sistem pertahanan semesta, yang berarti memadukan segala sumber daya nasional sebagai unsur kekuatan pertahanan. Tidak hanya kekuatan militer saja yang diperlukan, kekuatan nirmiliter juga memiliki peran tersendiri dalam sistem pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran IACS yang merupakan program tahunan Kementerian Luar Negeri RI sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter, dapat mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Disamping itu, analisis pada kontribusi terhadap pertahanan negara, khususnya pertahanan nirmiliter yang diberikan program IACS ini juga menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif, sementara data yang dibutuhkan diperoleh melalui rangkaian wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IACS mendukung pencapaian kepentingan nasional dengan membentuk citra positif negara, mempererat bahkan membangun hubungan bilateral maupun multilateral, hingga mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia. Dari perspektif pertahanan negara, IACS berkontribusi melalui aktifitas *people to people contact* yang meningkatkan kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Selain itu, aktifitas *people to people* juga meningkatkan CBM yang dimiliki Indonesia dengan pihak internasional, serta membantu terciptanya kerjasama. Meski begitu, masih diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antara Kemenlu dengan *stakeholder* terkait agar program ini lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Kata kunci: CBM, Diplomasi, IACS, Kebudayaan, Kemenlu, Kepentingan Nasional, Pertahanan.

---

<sup>1</sup> Gelar Nanggala W.S.P, S.Hum., M.Han adalah Mahasiswa Universitas Pertahanan 2017 Fakultas Strategi Pertahanan, Prodi Diplomasi Pertahanan

<sup>2</sup> Prof. Makarim Wibisono, Ph.D adalah dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan. Pembimbing 1

<sup>3</sup> Laksda TNI (Purn) Dr. Supartono, M.M adalah Wakil Rektor 2 di Universitas Pertahanan. Pembimbing 2

**Abstract** – The global politic that we're having is always dynamic. Thus, every single nation should be very prepared in taking any action in order to defend its national interest. Moreover, each nation must be able to face any form of challenges, including the potential threat. A shifting in terms of threat is also found, where a traditional threats that mostly come up in a form of military threats, turn into a non-traditional threats which are more complex if it's compared to the other one. As a response to this reality, Indonesia uses its total defense system, which involving all the national resources as their defense force essential. Aside from military force, nonmilitary force holds a significant role for the national defense system as well. Therefore, this research is conducted to see how IACS, an annual program brought by the Ministry of Foreign Affair of Indonesia, takes role as a non-military defense force in supporting the national interest. Other than that, this research aims to reveal how IACS contributes in the national defense, specifically as a non-military force. The method used in this study is qualitative, while numbers of interviews and literature studies are have been taken in order to obtain the data. The result shows that IACS supports Indonesia's national interest by constructing positive image of Indonesia to worldwide, strengthening and even creating the bilateral and multilateral affair, and also the embodiment of world peace. From the perspective of national defense, people to people contact activity resulted by IACS increases better understanding among nations, which minimizes the potential of conflicts. Furthermore, people to people contact activity contributes in escalating Indonesia's CBM, which led to international cooperation. Nevertheless, the writer thinks that a better coordination and synergy between the Ministry of Foreign Affair of Indonesia and related stakeholders are needed, so that this program could run more efficiently, effectively, and hit the target perfectly.

Keywords: CBM, Culture, Defense, Diplomacy, IACS, MoFA, National Interest

## Pendahuluan

Situasi politik dunia cenderung tidak stabil. Sifatnya yang dinamis menuntut negara-negara di dunia harus selalu siap dalam menentukan sikap dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi di dunia. Perkembangan lingkungan strategis semacam ini tentu berpengaruh pada penyelenggaraan pertahanan negara<sup>4</sup>. Lingkungan strategis sendiri dapat dipahami sebagai suatu area bagi aktor-aktor terkait yang dapat mempengaruhi satu sama lain, yang pada akhirnya akan berdampak

pada stabilitas yang terjadi antar aktor-aktor tersebut. Secara sederhana, lingkungan strategis ini menekankan pada analisa untuk memprediksi dan menganalisa perkembangan ancaman dan persaingan antar negara, baik secara regional maupun internasional<sup>5</sup>.

Lingkungan strategis inilah yang akan menentukan bagaimana sebuah negara menentukan kebijakan dalam negeri maupun luar negerinya. Penetapan kebijakan dalam negeri dan

---

<sup>4</sup> Buku Putih Pertahanan Indonesia. 2015. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

---

<sup>5</sup> Yugolastarob Komeini. 2009. Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Tenggara dan Stagnasi Postur Pertahanan Indonesia Periode 2001-2004. Jakarta: Universitas Indonesia

luar negeri berkaitan dengan tujuan nasional dan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Tujuan nasional Indonesia sendiri telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang didasari pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional Indonesia tersebut pada akhirnya yang menghasilkan kebijakan politik luar negeri “bebas-aktif” yang dianut Indonesia. Sementara itu, berdasar buku putih pertahanan Indonesia, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional<sup>6</sup>.

Tujuan nasional Indonesia secara umum telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4, dimana kepentingan nasional yang dimaksud termasuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional yang secara khusus yang diamanahkan terhadap Kementerian Luar Negeri terkait dengan hubungan antar bangsa. Kepentingan nasional khusus tersebut yakni:

- a. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dalam bidang multilateral,
- b. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerjasama kemanusiaan serta meningkatnya pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, komoditi,
- c. Perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerjasama multilateral.

Menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI bersifat permanen, sehingga keutuhan dan kedaulatan wilayah akan selalu menjadi

---

<sup>6</sup> Op. Cit. hlm 26

prioritas utama pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional tersebut yang menjadi landasan dalam perumusan *grand strategy* ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional dapat dipengaruhi oleh faktor domestik seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, dan interaksi antar masyarakat. Keamanan nasional menjadi salah satu poin penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu negara, mengingat potensi ancaman baik secara internal maupun eksternal yang mampu mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Seiring dengan dinamika politik internasional, tren ancaman juga mengalami pergeseran. Ancaman bersifat militer seperti invasi dan agresi militer kini perlahan mulai ditinggalkan. Hal ini didasari pertimbangan atas biaya yang dibutuhkan, konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan, hingga jumlah korban jiwa yang dihasilkan. Invasi militer dan agresi militer juga akan mengundang kritik dunia internasional yang berpotensi dijatuhkannya sanksi internasional, dan tentunya ini menjadi hal yang dihindari oleh setiap negara di kancah perpolitikan internasional.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah sendiri telah mempersiapkan sistem pertahanan dalam menyikapi ancaman nonmiliter.

Selain itu, gambaran atau citra suatu negara ternyata memiliki dampak tersendiri bagi keberlangsungan negara tersebut. Tak terkecuali untuk negara berkembang seperti Indonesia. Jika kita mundur sedikit ke belakang, di era reformasi Indonesia bisa dikatakan berada di situasi yang kelam. Konflik antar etnis, aksi terorisme, bencana alam, menjadi gambaran dari Indonesia di mata internasional pada periode tersebut. Hal-hal semacam itu lah yang menjadi ancaman nonmiliter, yang jika tidak segera direspon maka akan berpengaruh pada minat investasi asing serta dan juga pada kerjasama yang terjalin. Dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak buruk ada upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia, yang salah satunya adalah upaya pertahanan negara.

Menyikapi potensi ancaman nonmiliter, pemerintah sendiri melalui kementerian dan lembaga terkait telah melakukan beragam upaya, salah satunya upaya *soft power* dalam wujud diplomasi. Berbeda dengan *hard power* yang cenderung mengedepankan

kekuatan militer, *soft power* justru mengesampingkan kekuatan alutsista militer sebagai instrumennya. *Soft power* pertama kali dipopulerkan oleh Joseph Nye, dan *soft power* diartikan sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments*”<sup>7</sup>. Dapat diartikan bahwa *soft power* merupakan cara mencapai tujuan suatu negara yang dilakukan tanpa menggunakan unsur paksaan.

Salah satu bentuk *soft power* yang dapat dilakukan sebuah negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya adalah melalui bentuk diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan bentuk diplomasi yang memberi penekanan pada penggunaan budaya sebagai unsur utama dan akan memberikan kemungkinan partisipasi yang lebih luas<sup>8</sup>. Yang dimaksud dengan budaya atau kultur sendiri adalah lebih merujuk pada karakteristik masyarakat, yang dapat mencakup hal-hal seperti bahasa, agama, nilai-nilai adat, perilaku, keyakinan, serta kesenian<sup>9</sup>. Dengan kata

lain, maka kaitan yang dimaksud adalah bagaimana sebuah pola perilaku yang telah tertanam dalam sebuah masyarakat tertentu, dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan dibentuk. Keyakinan bahwa aspek budaya perlu menjadi fokus dalam perumusan kebijakan internasional, ditandai dengan pemahaman dari para cendekiawan yang menyatakan bahwa apabila kita mencoba untuk memahami hubungan antara dua negara, maka analisis terhadap masyarakat terkait memang perlu diberlakukan.

Aspek kultur dan hubungan internasional sendiri sebenarnya telah disinggung dalam buku *Clash of Civilization* oleh Samuel Huntington. Ia menjelaskan bahwa perbedaan paham ideologi dan identitas budaya sebuah negara mampu menyulut konflik di dunia ini<sup>10</sup>. Untuk itu, diplomasi kebudayaan dapat berperan sebagai media dalam menyuarakan ideologi dan pemahaman mengenai Indonesia, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang dapat terjadi akibat perbedaan budaya dan ketidaksepahaman.

---

<sup>7</sup> Joseph Nye. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. SAGE Journals

<sup>8</sup> Manuela Aguilar. 1996. *Cultural Diplomacy and Foreign Policy: German-American Relationship*. New York: Peter Lang

<sup>9</sup> Li dan Karakowsky. 2001. “Do We see eye-to-eye? Implication of Cultural Differences for Cross-Cultural Management Research and Practice”. *The Journal of Psychology*.

---

<sup>10</sup> Samuel P. Huntington. 1993. “*The Clash of Civilization*”. *Foreign Affairs*.

Pendapat terkait kultur juga diberikan oleh Zhu Majie, dimana ia menjelaskan bahwa kultur dapat mempengaruhi cara berpikir aktor pengambil keputusan, yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan yang dianutnya<sup>11</sup>. Dengan kata lain, nilai-nilai norma perilaku yang diterapkan seorang individu, akan dijadikan sebagai filter dan navigator dalam membantu individu tersebut untuk membuat sebuah keputusan.

Disamping itu, aspek budaya ini pun memiliki peran yang cukup unik dalam hubungan internasional. Budaya dapat berperan sebagai pemersatu aktor-aktor hubungan internasional dalam proses menjalin kerjasama. Dalam praktiknya, Korea Selatan adalah salah satu negara yang menerapkan bentuk diplomasi semacam ini. Korea Selatan mengirimkan 120 musisi dan artis ke Pyongyang-Korea Utara sebagai 'agen nasional' Korea Selatan dalam praktik diplomasi kebudayaan tersebut. Proses diplomasi budaya yang berlangsung adalah pertunjukkan musik oleh musisi dan artis Korea Selatan di Korea Utara<sup>12</sup>.

Dalam kancah perpolitikan internasional Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang eksklusif dan tertutup. Namun, melalui diplomasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut, ketegangan yang terjadi di antara kedua negara yang berbatasan secara langsung tersebut pun mulai mereda.

Diplomasi budaya juga dilakukan Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dengan program *Wonderful Indonesia* yang telah mendunia. Pertama kali diperkenalkan pada 2011, *Wonderful Indonesia* merupakan program unggulan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam rangka mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia secara global. Hal ini dilakukan Kementerian Pariwisata sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional, dimana bidang pariwisata mampu berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan citra Indonesia di dunia internasional yang erat hubungannya apabila dikaitkan dengan konteks

---

<sup>11</sup> Zhu Majie. 2002. "The Role of Soft Power in International Relations".

<sup>12</sup> DW. 2018. Diplomasi K-Pop Korea Selatan Yang Meriah Menggoyang Pyongyang. [Online] <https://www.dw.com/id/diplomasi-k-pop->

---

[korea-selatan-yang-meriah-menggoyang-pyongyang/a-43224685](https://www.dw.com/id/diplomasi-k-pop-pyongyang/a-43224685) Diakses pada 24 Juli 2018

kepentingan nasional dan pertahanan negara<sup>13</sup>.

*Wonderful Indonesia* juga telah beberapa kali diakui eksistensinya dengan mendapatkan penghargaan, salah satunya dari *United Nations World Tourism Organization*, salah satu badan turunan PBB. Hal ini juga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dimana BPS mencatat terjadi peningkatan sebesar 21,88 persen pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2017 bila dibandingkan tahun sebelumnya<sup>14</sup>. Peningkatan ini tentu memberikan kontribusi pada pertahanan ekonomi negara melalui pendapatan devisa negara.

Bentuk diplomasi kebudayaan tersebut menunjukkan implementasi dari apa yang tertuang di Buku Putih Pertahanan Indonesia, dimana peran Kementerian atau Lembaga diluar bidang pertahanan militer diharapkan menjadi unsur utama dalam mendukung pertahanan nirmiliter. Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian di garda

terdepan negara dalam konteks hubungan internasional merupakan salah satu kementerian diluar bidang pertahanan yang memiliki peran tersendiri di dalam pertahanan negara. Kekuatan diplomasi merupakan kekuatan utama yang selalu dikedepankan oleh kementerian luar negeri dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Hal ini sejalan dengan konteks pertahanan negara yang mengedepankan pada pencapaian kepentingan nasional, dimana pertahanan negara dapat diartikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>15</sup>.

Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah program *Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS)* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). IACS merupakan bentuk

---

<sup>13</sup> Potensi Pariwisata Indonesia. [Online] <http://indonesia.go.id/in/potensi-daerah/pariwisata> Diakses pada 27 Juli 2018

<sup>14</sup> Situs Badan Pusat Statistik. [Online] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan--.html> Diakses pada 29 Juli 2018

---

<sup>15</sup> Conni Rahakundini Bakrie. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

diplomasi berbasis budaya yang telah dicanangkan kementerian luar negeri Republik Indonesia sejak tahun 2003. Pada awalnya IACS sendiri hanya ditargetkan untuk negara anggota *South West Pacific Dialogue* yakni Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Timor-Leste dan Indonesia sebagai tuan rumah. Namun, seiring dengan signifikansi dan hal positif yang dirasakan oleh pemerintah maka program beasiswa budaya ini terus berkembang sehingga pesertanya meluas dari seluruh negara di dunia. Tercatat dari periode 2003 hingga 2018 program ini telah menghasilkan sebanyak 848 alumni yang berasal dari 74 negara di dunia<sup>16</sup>.

Yang menjadi salah satu tujuan dari diadakannya program ini adalah menanamkan rasa kebersamaan dan tumbuhnya saling pengertian antar negara. Hal ini dimulai melalui pemahaman pemuda-pemuda dari tiap-tiap negara di dunia yang memiliki keberagaman latar belakang, agama, bahasa, adat istiadat hingga gender. Pemahaman tersebut pula yang diharapkan mampu menjaga hubungan

bilateral Indonesia dengan negara-negara asal peserta, sehingga tercipta situasi yang harmonis dan damai, yang menjauhkan diri dari potensi ancaman konflik bagi negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin melihat bagaimanakah peran kementerian luar negeri Indonesia dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional dan pertahanan negara melalui IACS ini. Mengingat bahwa diplomasi kebudayaan atau upaya diplomasi berbasis budaya menurut mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Soemadi Brotodiningrat, kurang diprioritaskan oleh pemerintah dimana beliau menganggap bahwa Indonesia memiliki potensi tinggi dalam hal ini<sup>17</sup>.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional secara sederhana dapat disimpulkan sebagai tujuan atau 'misi' yang harus dicapai oleh sebuah negara. Dalam kepentingan nasional tersebut peran negara sebagai aktor pengambil keputusan sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>16</sup> Kementerian Luar Negeri RI. 2017. 2018 *Indonesian Arts and Culture Scholarship*. [Online] <https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/2018-Indonesian-Arts-and-Culture-Scholarship.aspx> Diakses pada 20 Juli 2018

---

<sup>17</sup> Indah Wulandari. 2015. *Diplomasi Budaya Indonesia Masih Rendah*. [Online] <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/29/nwymzy346-diplomasi-budaya-indonesia-masih-rendah> Diakses pada 20 Juli 2018

kehidupan masyarakatnya. Hal ini didukung dengan pendapat seorang ahli, Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa negara merupakan ‘pelindung’ wilayah, penduduk, serta *way of life* yang otentik. Hans J. Morgenthau juga mengatakan bahwa kepentingan nasional merupakan instrumen dalam mengejar kekuasaan, demi memiliki kuasa atau kontrol terhadap negara lain. Selain itu Morgenthau juga menambahkan bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan negara untuk dapat melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya dari intervensi negara lain<sup>18</sup>.

Teori diplomasi juga digunakan dalam penelitian ini. Asianto Sinambela memberikan penjelasannya mengenai diplomasi. Menurutnya diplomasi dapat dipahami sebagai mekanisme representasi, komunikasi, dan negosiasi, melalui negara-negara dan aktor internasional lainnya dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya<sup>19</sup>. Aktifitas negosiasi merupakan core atau inti yang menjadi esensi dari proses diplomasi. Diplomasi juga dilakukan

sebagai upaya menuju perdamaian dalam sebuah situasi konflik, dimana diplomasi memiliki peran sebagai manajemen konflik.

Konsep Diplomasi Kebudayaan juga digunakan dalam tulisan ini. diplomasi kebudayaan sendiri dapat dinyatakan sebagai usaha sebuah negara untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan ini mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, hingga propaganda<sup>20</sup>. Diplomasi kebudayaan bertujuan untuk membentuk opini publik internasional, sehingga dapat mendukung kebijakan politik luar negeri suatu negara tertentu. Hal ini memungkinkan diplomasi kebudayaan mampu mendukung usaha pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Dalam praktiknya sendiri, diplomasi kebudayaan dapat dijalankan melalui program pemerintahan, media elektronik, maupun cetak.

Seperti bentuk diplomasi pada umumnya, diplomasi kebudayaan ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan suatu negara melalui dimensi seperti ideologi, teknologi,

---

<sup>18</sup> Hans J. Morgenthau. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*

<sup>19</sup> Asianto Sinambela. 2007. *Penjelasan Umum Mengenai Blue Print, Arah, dan Strategi Diplomasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Jakarta: Proceeding Bank Indonesia

---

<sup>20</sup> K.J. Holsti. 1984. *International Politics, A Framework for Analysis Third Edition*. New Delhi: Prentice

politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lainnya dalam percaturan masyarakat internasional.

Selain itu, pemahaman mengenai ilmu pertahanan juga dituliskan dalam penelitian ini. Menurut Makmur Supriyatno Ilmu pertahanan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional baik pada saat masa damai, perang, dan sesudah perang, dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri<sup>21</sup>. Ancaman yang dimaksud pun sifatnya luas, tidak hanya ancaman bersifat militer, namun juga ancaman yang bersifat nonmiliter yang mampu mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa.

Selain itu konsep diplomasi pertahanan juga digunakan dalam tulisan ini. Diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai wujud diplomasi yang digunakan untuk meningkatkan kerjasama militer, mengurangi ketegangan yang terjadi antar negara, hingga menjaga aliansi dan membuka kesempatan untuk terwujudnya kerjasama atau latihan

bersama<sup>22</sup>. Pedrason dalam disertasinya menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan kini mengalami perluasan makna, dan tidak lagi dapat disamakan dengan diplomasi militer. Diplomasi pertahanan merupakan segala metode serta strategi yang diterapkan oleh suatu negara dengan mengerahkan segala upaya di bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik serta kerjasama pertahanan. Melalui dimensi-dimensi diplomasi tersebut diplomasi pertahanan diharapkan mampu merekatkan hubungan antar negara serta membangun kepercayaan (*mutual trust*) dan *confidence building measures* (CBM)<sup>23</sup>.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui program IACS, sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia mampu mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk

---

<sup>21</sup> Ibid

---

<sup>22</sup> Mulloy G. 2007. *Japan's Defense Diplomacy and "Cold Peace" in Asia*. Asia Journal of Global Studies

<sup>23</sup> Rodon Pedrason. "ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community". Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Institut Fur Politische Wissenschaft

melihat bagaimana sumbangsih yang diberikan program IACS dalam mendukung pertahanan negara. Dengan begitu, maka metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena metode kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek sosial<sup>24</sup>.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah ingin melihat bagaimana diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui program IACS, sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia mampu mendukung pertahanan negara. Diplomasi budaya erat kaitannya dengan aspek sosial, sehingga pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Selain itu metode kualitatif juga dipilih karena dalam metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan proses interpretasi dari hasil yang sudah ditemukan<sup>25</sup>. Hal ini sesuai dengan proses interpretasi yang akan dilakukan

peneliti saat data sudah sepenuhnya diperoleh, sehingga dihasilkan hasil penelitian yang lengkap.

Penulisan penelitian kualitatif ini akan difokuskan pada penggunaan sumber data primer berupa *in depth interview* dan data sekunder berupa studi pustaka. Untuk menganalisis data, teknik analisis dalam pendekatan kualitatif lebih bersifat induktif, dimana analisis akan diarahkan dari sesuatu yang spesifik menjadi ke arah temuan yang lebih umum<sup>26</sup>. Teknik analisis ini mencakup beberapa tahap seperti pengumpulan data (*data collection*), pemadatan data atau kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data presentation*), dan penyusunan kesimpulan (*conclusions*).

## **Pembahasan**

### **Program IACS (Indonesia Arts and Culture Scholarship) dalam Mendukung Upaya Pencapaian Kepentingan Nasional.**

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki peran penuh dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Menjaga

---

<sup>24</sup> John Cresswell. 2014. *“Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches”*. California: Sage Publication

<sup>25</sup> Winston Jackson. 1995. *“Approaches to Methods”*. Scarborough: Prentice-Hall Canada

---

<sup>26</sup> Michael Huberman and Matthew Miles. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publication

eksistensi dan kedaulatan negara, dalam hal ini adalah pengakuan pihak internasional atas kedaulatan Indonesia merupakan prioritas utama. Selain itu, menjalankan politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, dan turut berperan dalam menjaga perdamaian dunia tak luput menjadi tugas Kementerian Luar Negeri Indonesia. Salah satu wujud nyata kementerian luar negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut ialah pada program IACS. Program tahunan yang menginjak tahun ke 15 pada tahun 2018 ini merupakan bentuk diplomasi kebudayaan yang berfungsi untuk membina dan membangun hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara lain. Selain itu, IACS juga diadakan sebagai bentuk diplomasi kebudayaan yang bertujuan untuk membentuk citra positif Indonesia yang nantinya akan dipancarkan ke dunia internasional melalui para peserta program tersebut.

Menurut mantan menteri luar negeri Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda, usia 15 tahun menunjukkan bahwa program ini telah melewati *critical test* dan menunjukkan bahwa *sustainability* yang dimiliki program ini tidak main-

main<sup>27</sup>. Dengan kata lain, program ini memiliki dampak dan signifikan terhadap kepentingan negara, sehingga terus dipertahankan penyelenggaraannya. IACS atau *Indonesia Arts and Culture Scholarship* merupakan bentuk dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri. Diplomasi sendiri pada awalnya hanya diartikan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan demi mencapai tujuan politik luar negeri masing-masing negara pelaku diplomasi<sup>28</sup>.

Pada awalnya diplomasi pun masih dianggap sebagai hal yang konvensional, dimana diplomasi erat kaitannya dengan perundingan para pemerintah negara-negara. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, teknologi, dan tataran politik dunia, praktik diplomasi pun ikut berubah dari segi bentuk dan juga pelaku yang terlibat. Praktik diplomasi kini dapat berupa pertemuan, kunjungan, hingga pertukaran pelajar. Selain itu, diplomasi juga dianggap sebagai upaya manajemen konflik, baik untuk meredam konflik

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Dr. Hassan Wirajuda pada 9 Oktober 2018

<sup>28</sup> S.L Roy. 1995. Diplomasi. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada

maupun untuk memelihara situasi damai<sup>29</sup>.

IACS merupakan program beasiswa yang diberikan kepada pemuda asing, dengan mendatangkan mereka untuk belajar dan mengenal Indonesia melalui aspek kebudayaan dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hal ini juga ditujukan untuk memelihara hubungan baik Indonesia dengan negara asal peserta, serta meminimalisir terjadinya konflik. Selain itu, berdasarkan pada kebijakan pertahanan negara tahun 2018 oleh Kementerian Pertahanan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial menjadi salah satu agenda prioritas pertahanan<sup>30</sup>.

Restorasi sosial sendiri apabila mengacu pada Kementerian Sosial dapat diartikan sebagai upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat, yang mengalami kondisi memudarnya nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa, sehingga dapat kembali ke kondisi idealnya. Konten dari IACS yang mengangkat nilai-nilai asli kebudayaan

bangsa Indonesia dirasa akan mendukung upaya restorasi sosial tersebut. Dengan mengangkat dan terus melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia, diharapkan IACS mampu menjaga dan mengingatkan masyarakat Indonesia akan jati diri bangsa Indonesia, dan terus memegang teguh nilai-nilai luhur kebangsaan.

Lebih lanjutnya, IACS sendiri dapat dikatakan mendukung tujuan dan sifat politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia, yakni politik bebas-aktif. IACS memfasilitasi untuk terjalinnya relasi antar masyarakat di dunia agar dapat saling memahami dan hidup dalam damai, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam perwujudan perdamaian dunia. Turut berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dunia merupakan salah satu dari kepentingan nasional Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa IACS mampu mendukung kepentingan politik luar negeri Indonesia dan dalam upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

IACS merupakan wujud dari diplomasi kebudayaan yang dijalankan

---

<sup>29</sup> Adam Watson. 1984. *The Dialogues Between States*. London: Methuen

<sup>30</sup> Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018. 2018. Kementerian Pertahanan [Online] <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/02/LAMPIRAN-JAKHANNEG-2018-FINAL.pdf> Diakses pada 1 Januari 2019

Kementerian Luar Negeri RI demi mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia. Diplomasi kebudayaan ini pada dasarnya bukanlah hal yang benar-benar baru, karena diplomasi kebudayaan telah beberapa kali disebutkan dalam berbagai literatur sebagai *Cultural Techniques in Foreign Policy*<sup>31</sup>. Jika ditelaah dari definisinya, diplomasi kebudayaan sendiri dapat dinyatakan sebagai usaha sebuah negara untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan ini mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, hingga propaganda<sup>32</sup>. Tidak hanya itu, dimensi lain seperti ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lainnya dalam percaturan masyarakat internasional juga menjadi unsur dalam diplomasi kebudayaan. Sementara itu program IACS sendiri terdiri atas pemberian materi terkait seni musik, tarian, hingga nilai-nilai filosofis yang tertanam dalam masyarakat di Indonesia. Aktifitas dalam program IACS yang memiliki *core* pada

peran *people to people* sejalan dengan inti dari diplomasi kebudayaan itu sendiri.

Para peserta program IACS yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia diharapkan akan memahami nilai-nilai dan ideologi yang dianut di Indonesia. Kemajemukan yang dimiliki masyarakat Indonesia namun disisi lain masih mampu bergandengan tangan dalam perdamaian, diharapkan menjadi cerminan masyarakat Indonesia yang ditampilkan di dunia internasional. Hal ini selaras dengan diplomasi kebudayaan yang bertujuan untuk membentuk opini publik internasional, sehingga dapat mendukung kebijakan politik luar negeri suatu negara tertentu.

IACS sebagai salah satu bentuk diplomasi kebudayaan memiliki peran dalam upaya pencapaian kepentingan nasional. Berbicara mengenai kepentingan nasional, usaha-usaha untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara terhadap dunia internasional tentu merupakan poin yang tidak dapat dilepaskan. Hal tersebut dapat diraih dengan membentuk citra positif yang baik mengenai Indonesia, yang nantinya akan membentuk opini publik yang baik pula terhadap Indonesia. Kegiatan seperti ini

---

<sup>31</sup> Charles O. Lerche Jr. & Abdul A. Said. 1964. *The Concept of International Politics*. New Jersey: Prentice

<sup>32</sup> K.J. Holsti. 1984. *International Politics, A Framework for Analysis Third Edition*. New Delhi: Prentice

bisa disebut sebagai *Nation Branding*<sup>33</sup>. Melalui IACS, pemerintah ingin mencerminkan Indonesia sebagai negara yang aman, damai, demokratis dengan keberagaman masyarakat dan kekayaan budaya yang dimiliki. Dengan begitu, maka IACS merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menggalakan *soft power* untuk memikat pihak internasional dengan membangun citra positif Indonesia, demi melancarkan kepentingan nasionalnya.

Hal ini memungkinkan bila dikaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Joseph Nye, dimana ia mengatakan bahwa *soft power* sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments*”.<sup>34</sup> Menurut Nye *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus dengan cara paksaan atau imbalan namun melalui *attraction*. Nilai-nilai kesenian dan budaya yang ditampilkan pada program IACS inilah yang dijadikan sebagai *point of attraction* dari *soft power* tersebut. Dalam visi Kementerian Luar Negeri RI, terdapat kepentingan nasional Indonesia

yang diterjemahkan kedalam “*Sapta Dharma Caraka*”, yang beberapa diantaranya berisi sebagai berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia.
- b. Memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme.
- c. Meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati HAM dan memajukan perdamaian dunia.

IACS sebagai program oleh Kementerian Luar Negeri RI pun berkontribusi pada upaya realisasi kepentingan nasional tersebut. Pada poin pertama yakni memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap Indonesia, IACS berupaya menggalang dukungan internasional melalui jalinan *people to people contact* yang terjadi dengan para peserta program IACS. Para alumni IACS yang menjadi *friends of Indonesia* diharapkan mampu

---

<sup>33</sup> Tonny Dian Efendi. 2011. *Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan*. Bogor: Ghalia Indonesia

<sup>34</sup> Joseph S. Nye, Jr. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. Public Affairs: New York.

bersuara membela Indonesia apabila terjadi kesalahpahaman terkait Indonesia di dunia internasional<sup>35</sup>.

Sementara itu pada poin kedua, yakni memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme, program IACS juga memiliki kontribusi yang sama. Program IACS yang kini telah mencakup hingga total 74 negara di seluruh dunia secara tidak langsung telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut. Meluasnya cakupan negara peserta IACS bisa dikatakan sebagai upaya memperkuat multilateralisme. Hubungan diplomatik ini yang nantinya diharapkan mampu membawa pada jalinan kerjasama dengan Indonesia. Salah satu contoh adalah yang terjadi antara Indonesia dengan Cina. Cina merupakan negara mitra strategis Indonesia. Cina sendiri telah mengikuti program IACS sejak tahun 2006 hingga saat ini. Hubungan bilateral RI dengan Cina sendiri kini menjadi hubungan Kemitraan Strategis

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Arief Ilham Ramadhan selaku pihak Kemenlu RI

Komprehensif sejak tahun 2013. Meningkatnya perekonomian di kedua negara ini menjadi daya tarik warga kedua negara, baik di sisi perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, hingga budaya. Kerjasama pun terjalin, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya<sup>36</sup>.

Sementara itu, IACS juga berperan dalam meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati HAM dan memajukan perdamaian dunia. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu peserta program IACS, didapati bahwa para peserta melihat toleransi yang ada pada masyarakat Indonesia saat mengikuti program IACS. Para peserta yang sebagian besar non muslim ikut merasakan dan melihat bagaimana suasana buka puasa bersama, yang membuat mereka terkesan dengan nilai toleransi yang ada pada masyarakat Indonesia. Mereka melihat, meski masyarakat Indonesia sangat majemuk, namun nilai toleransi masih dijunjung tinggi<sup>37</sup>. Hal ini tentu menjadi stimulus yang baik dalam meningkatkan citra

---

<sup>36</sup> Buku Diplomasi Indonesia 2014 oleh Kementerian Luar Negeri RI

<sup>37</sup> Wawancara dengan Halen Parti, Peserta program IACS 2018

Indonesia di dunia internasional, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Selain itu, adanya *cross culture interaction* yang terjadi saat penyelenggaraan program IACS menghasilkan *learning and sharing process*. Proses *learning and sharing* seperti ini yang akan melahirkan pemahaman yang lebih baik atau *better understanding* antara para peserta dengan sesama peserta, juga antar peserta dengan masyarakat Indonesia setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesepahaman satu sama lain, sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik. Secara tidak langsung, ini sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia terkait upaya memajukan perdamaian dunia.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IACS memiliki pengaruh dan tujuan sendiri dalam upaya pencapaian kepentingan nasional. Aktifitas *people to people contact* dengan banyak negara di dunia berdampak pada pembentukan citra Indonesia di mata internasional. Selain itu, IACS juga mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional dalam konteks memperoleh dukungan internasional terkait kedaulatan Indonesia, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak internasional.

### **Kontribusi Diplomasi Kebudayaan melalui IACS dalam Mendukung Pertahanan Negara**

Dari penjelasan sebelumnya terkait tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri dan dikaitkan dengan UUD 1945 pasal 8 ayat 3 mengenai tugas Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam menjalankan pemerintahan darurat, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran pertahanan negara. Segala kebijakan yang dijalankan Kementerian Luar Negeri tentu berorientasi pada kedaulatan bangsa dan negara. Lalu bagaimana IACS sebagai salah satu program oleh Kementerian Luar Negeri RI berperan dalam mendukung upaya pertahanan negara, terutama pertahanan nirmiliter?

Perlu diperhatikan bahwa ilmu pertahanan kini telah mengalami perluasan makna. Ilmu pertahanan bukan hanya mengenai “strategi” atau “ilmu militer” yang bukan sekedar mempelajari penggunaan angkatan bersenjata. Ilmu pertahanan juga bukan semata-mata mengenai taktik atau seni perang yang dimanfaatkan pada saat

kondisi perang. Menurut Makmur Supriyatno, ilmu pertahanan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional baik pada saat masa damai, perang, dan sesudah perang, dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri<sup>38</sup>. Ancaman yang dimaksudkan disini pun bukan lagi hanya terbatas pada bentuk ancaman bersifat militer, melainkan juga pada bentuk ancaman nonmiliter yang mampu mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Kementerian Luar Negeri RI sebagai kementerian di luar bidang pertahanan merupakan sumber kekuatan pertahanan nirmiliter yang dibutuhkan dalam merespon ancaman yang bersifat nonmiliter. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam buku putih pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan. Terkait dengan pertahanan nirmiliter, Kementerian/Lembaga merupakan kekuatan pertahanan nirmiliter yang

dalam peran, tugas dan kewenangannya mengelola dan membina sumber daya nirmiliter yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat<sup>39</sup>. Melalui program IACS, Kementerian Luar Negeri RI menjalankan fungsi pertahanan nirmiliter. IACS memang mengedepankan pada aspek *people to people contact*, dimana artinya adalah hubungan antar masyarakat menjadi titik utama dalam aktifitas diplomasi yang dilakukan.

Kontak langsung yang terjadi antara para peserta IACS dengan masyarakat Indonesia diharapkan menjadi jembatan penghubung yang mampu mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam konteks pertahanan. Adriana Elisabeth selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI menambahkan bahwa diplomasi kebudayaan yang dilancarkan melalui IACS ini merupakan dukungan terhadap pertahanan nirmiliter. Ia mengatakan bahwa IACS mampu menumbuhkan *trust* yang akan berdampak pada terjalinnya komunikasi yang baik antara Indonesia

---

<sup>38</sup> Makmur Supriyatno. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

---

<sup>39</sup> Situs Resmi Kementerian Pertahanan RI. 2015. Kementerian/Lembaga Menjadi Unsur Utama Menghadapi Ancaman Pertahanan Nirmiliter [Online] <https://www.kemhan.go.id/2015/06/12/kemterianlembaga-menjadi-unsur-utama-menghadapi-ancaman-pertahanan-nirmiliter.html> Diakses pada 13 Januari 2019

dengan negara peserta, sehingga kemungkinan terjadinya kerja sama akan lebih terbuka<sup>40</sup>.

*People to people contact* memang merupakan aspek pertahanan yang paling terlihat dari program IACS. Jalinan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain membentuk sebuah pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter yang dimaksud adalah kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat asing, kemampuan sosial yang ditunjukkan dari pengenalan budaya, serta kemampuan moral yang ditunjukkan dalam bentuk mempromosikan budaya kerukunan, keramahtamahan, dan persatuan Indonesia dalam rangkaian penyelenggaraan<sup>41</sup>. Seluruh kemampuan tersebut terdapat pada penyelenggaraan program IACS.

*People to people contact* begitu penting, hingga Presiden Joko Widodo sepakat untuk mengedepankan *people to people contact* dengan negara-negara di dunia, termasuk Australia demi terciptanya hubungan baik dan stabil,

serta kemungkinan terjalinnya kerjasama strategis antara Indonesia dan Australia<sup>42</sup>. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui *people to people contact* dalam program IACS ini akan tercipta sebuah *understanding* dari masyarakat asing terhadap Indonesia. Melalui pemahaman yang tepat mengenai Indonesia, maka akan mendorong untuk terciptanya *trust* atau rasa percaya sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya konflik yang mampu menjadi ancaman bagi sebuah negara.

Ini sesuai bila dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Korea Utara beberapa tahun kemarin, dimana Korea Utara memutuskan untuk menutup diri dari segala aktifitas hubungan internasional. Hal tersebut berdampak pada Korea Utara yang terasingkan dari dunia internasional, dan timbul ketegangan politik dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat. Adriana Elisabeth juga menambahkan bahwa program IACS ini bisa menjadi *channel* yang membuka jalur komunikasi yang lebih baik antara Indonesia dengan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Adriana Elisabeth pada 12 November 2018

<sup>41</sup> Makarim Wibisono, Tri Legionosuko dan Eka Yunida. 2017. Peran Diaspora dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus Diaspora Indonesia di Belgia). Jurnal Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan

---

<sup>42</sup> Situs Resmi Presiden RI. 2017. Jalin Hubungan Lewat People to People Contact. [Online] <http://presidenri.go.id/berita-aktual/jalin-hubungan-lewat-people-to-people-contact.html> Diakses pada 4 Februari 2019

dunia internasional. Hal ini tentu menjadi sangat krusial dimana komunikasi yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pihak internasional tentu akan membuka kesempatan-kesempatan kerjasama, yang mampu mendukung usaha pertahanan negara.

Melalui penjelasan diatas, dapat dipastikan bahwa Kementerian Luar Negeri RI melalui program beasiswa IACS ini berhasil menjalankan perannya. Hal ini dikarenakan IACS sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Bennet, bahwa Kementerian Luar Negeri RI sebagai organisasi atau badan dengan ruang lingkup internasional memiliki peran sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang. Dimana diharapkan kerjasama yang terjalin akan membawa keuntungan bagi setiap negara yang terlibat
- b. Menyediakan jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara sehingga dapat mempermudah dan memperkaya akses

komunikasi apabila terjadi ketegangan di masa mendatang.

Dengan begitu dapat dikatakan IACS juga merupakan wujud diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Memang pada awalnya, istilah diplomasi pertahanan sangat erat kaitannya dengan pengerahan kekuatan angkatan bersenjata. Hal itu dimulai dengan dirilisnya dokumen resmi oleh kementerian pertahanan Inggris pada tahun 1998. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan situasi tataran dunia internasional yang dinamis, maka diplomasi pertahanan pun mengalami perluasan makna.

Diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai wujud diplomasi yang digunakan untuk meningkatkan kerjasama militer, mengurangi ketegangan yang terjadi antar negara, hingga menjaga aliansi dan membuka kesempatan untuk terwujudnya kerjasama atau latihan bersama<sup>44</sup>. Pedrason dalam disertasinya juga berpendapat bahwa diplomasi pertahanan kini mengalami perluasan makna, dan tidak lagi dapat disamakan

---

<sup>43</sup> Leroy Bennet. 1995. *International Organization, Principle and Issue*. New Jersey: Prentice Hall Inc

---

<sup>44</sup> Mulloy G. 2007. *Japan's Defense Diplomacy and "Cold Peace" in Asia*. Asia Journal of Global Studies

dengan diplomasi militer. Diplomasi pertahanan merupakan segala metode serta strategi yang diterapkan oleh suatu negara dengan mengerahkan segala upaya di bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik serta kerjasama pertahanan. Melalui dimensi-dimensi tersebut diharapkan mampu merekatkan hubungan antar negara serta membangun kepercayaan (*mutual trust*) dan *confidence building measures* (CBM)<sup>45</sup>. Dengan begitu, berdasarkan pada konten dan tujuan akhir yang ingin dicapai, maka IACS dapat dikatakan sebagai diplomasi kebudayaan, yang secara bersamaan berfungsi sebagai diplomasi pertahanan yang dapat mendukung pertahanan negara.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, IACS merupakan bentuk *soft power* yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia, salah satunya tentunya adalah ditinjau dari segi pertahanan negara. Sebagai bentuk diplomasi pertahanan melalui dimensi budaya, IACS dengan peran uniknya mampu berkontribusi yakni melalui *people to people contact* yang terjadi

diantara para peserta program IACS dengan masyarakat setempat selama kegiatan beasiswa tersebut berlangsung. Proses *people to people contact* tersebut akan memberikan pengalaman langsung kepada para peserta IACS yang berasal dari luar negeri untuk merasakan bagaimana keadaan sosial, seni, dan budaya Indonesia yang sebenarnya. Pesan bahwa Indonesia merupakan negara yang “aman” itulah yang ingin disebarluaskan melalui program IACS ini<sup>46</sup>.

Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia pada awal era reformasi yang tidak stabil. Kondisi politik yang belum stabil hingga aksi terorisme Bom Bali pada tahun 2002 berdampak pada citra negatif Indonesia di dunia internasional. Untuk itu lah pada tahun 2003, program IACS dicetuskan untuk pertama kalinya untuk merespon bentuk ancaman yang dapat mengancam tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Ini didukung oleh pernyataan Dr. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI yang menjabat pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa program ini membantu untuk memulihkan wajah

---

<sup>45</sup> Rodon Pedrason. “*ASEAN’s Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community*”. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut Für Politische Wissenschaft,

---

<sup>46</sup> Maylani Kurnia. 2015. *Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan Indonesia*. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi

Indonesia yang babak belur pada saat itu, dikarenakan berbagai masalah seperti bom, kerusuhan, konflik antar etnis, yang memang marak terjadi di Indonesia pada era awal reformasi<sup>47</sup>.

Beliau juga menambahkan bahwa citra sebuah negara di dunia internasional bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan. Hal ini terbukti dengan apa yang terjadi pada Venezuela. Krisis ekonomi yang melanda Venezuela pada 2016 berdampak buruk pada kerjasama bilateral antara Venezuela dengan Tiongkok<sup>48</sup>. Selain berdampak pada kerjasama yang terjalin, tingkat kesejahteraan masyarakat pun menurun drastis. Kondisi perekonomian negara yang runtuh menyebabkan jutaan warga Venezuela memilih untuk bermigrasi meninggalkan Venezuela, sehingga keluarga pun tercerai berai<sup>49</sup>.

Kesejahteraan masyarakat merupakan poin penting dalam kepentingan nasional Indonesia yang erat kaitannya dengan perjuangan

pertahanan nirmiliter negara. Untuk itu wajah dan keadaan Indonesia yang baik perlu diproyeksikan ke dunia internasional, sehingga mampu membuka pintu kerjasama dan investasi yang datang ke Indonesia. Hal ini terkait dengan usaha pemerintah untuk terus memajukan pembangunan secara menyeluruh di Indonesia.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, CBM atau *Confidence Building Measure* merupakan segala bentuk upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, *the level of uncertainty* antara negara-negara. Tingkat ketidakpastian yang tinggi akan berdampak pada kecurigaan yang dapat terjadi sehingga mampu memicu konflik diantara pihak-pihak yang bertikai<sup>50</sup>. Untuk itu pemerintah Indonesia pun perlu untuk memiliki tingkat CBM yang baik dengan pihak internasional.

CBM sendiri dapat dilakukan pada tingkat unilateral, bilateral, hingga multilateral. Program IACS dapat dikatakan berada pada tingkat multilateral, dengan cakupan 74 negara. CBM pada intinya bertujuan untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan dari pihak lain. Untuk mendapatkan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Dr. Hassan Wirajuda pada 9 Oktober 2018

<sup>48</sup> Dykha Ancikita Macintas. 2018. Dampak Krisis Ekonomi Venezuela Tahun 2016 Terhadap Kerjasama Bilateral Tiongkok – Venezuela. Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta

<sup>49</sup> BBC Indonesia. 2018. Dampak Krisis Venezuela: Keluarga Tercerai Berai. [Online] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45368100> Diakses pada 13 Januari 2019

---

<sup>50</sup> Brad Glosserman. 2005. *Cross-Strait Confidence Building Measures*. Honolulu: Issues & Insights

kepercayaan tersebut, tentunya dibutuhkan proses yang berkelanjutan dan bertahap. Pelaksanaan IACS yang terus dilaksanakan dari tahun ke tahun secara tidak langsung menunjukkan konsistensi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI dalam menjual program IACS ke negara-negara di dunia.

Konsistensi Kementerian Luar Negeri RI dalam menjual program IACS ini bertujuan untuk menjalin atau mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Dimana pada akhirnya, mendapatkan *trust* melalui proses CBM merupakan tujuan yang ingin dicapai. Diharapkan dengan semakin eratnya hubungan bilateral yang terjalin, akan diiringi dengan kemungkinan terbentuknya kemitraan strategis dalam sektor, ekonomi, politik, maupun pertahanan. CBM tidak hanya dilakukan dalam konteks militer, namun juga ekonomi, sosial budaya, serta politik. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam mencapai CBM tentunya disesuaikan dengan aspek terkait. Bila ditinjau dari tabel tersebut, maka IACS dapat dikategorikan pada aspek sosial budaya.

CBM dapat diperoleh salah satunya melalui aspek sosial budaya yakni dengan cara meningkatkan *people*

*to people links*, atau dengan kata lain meningkatkan hubungan langsung antar masyarakat. Dalam hal ini, *people to people links* yang terjadi pada pelaksanaan program IACS adalah kontak langsung antara warga asing para peserta program IACS, dengan masyarakat lokal setempat di Indonesia. Dalam salah satu wawancara peneliti dengan salah satu peserta program IACS pada tahun 2018, IACS sangat berkontribusi dalam menanamkan rasa cinta terhadap Indonesia dalam diri para peserta program tersebut.

Proses terbentuknya CBM antara Indonesia dengan dunia internasional melalui IACS ini juga terjalin saat proses seleksi peserta program beasiswa ini. Menurut data yang diperoleh pada proses wawancara dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI, proses seleksi peserta program ini melibatkan pihak KBRI dan Konsulat Jenderal RI di negara-negara asal para peserta. Kontak langsung yang terjadi antara KBRI maupun Konsulat Jenderal RI di negara setempat dengan para calon peserta program IACS ini secara langsung dirasa akan memberikan dampak positif pada CBM yang terjalin antara Indonesia dengan masing-masing negara.

Kementerian Pertahanan juga turut berperan dalam aktifitas diplomasi budaya. Dalam acara bertajuk MBBI (Malam Budaya dan Bahasa Internasional), Kementerian Pertahanan mengumpulkan siswa-siswa dari berbagai negara, untuk menyatukan para peserta tersebut sehingga diharapkan mampu meningkatkan persahabatan dan kerjasama harmonis di bidang pertahanan<sup>51</sup>. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa melalui IACS ini pemerintah mengharapkan terjalinya hubungan bilateral yang baik, yang mampu menghasilkan sebuah kemitraan strategis.

Salah satu negara peserta IACS yang pada akhirnya berlanjut pada kerjasama jangka panjang adalah Perancis. Perancis telah bergabung menjadi peserta program IACS sejak tahun 2010. Perancis juga merupakan salah satu negara yang melakukan praktik diplomasi budaya. Bentuk diplomasi budaya yang dilakukan Perancis dengan Indonesia yakni melalui IFI (*Institut Francais Indonesia*), yang

merupakan bagian dari kedutaan besar Perancis untuk Indonesia. IFI merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kerjasama antara Indonesia dan Perancis di bidang kebudayaan, pendidikan, linguistik, sains dan teknologi, serta pendidikan tinggi<sup>52</sup>. Diplomasi kebudayaan yang dilakukan Perancis ini berdampak pada peningkatan hubungan baik, jalinan *people-to-people-contact* antara masyarakat Perancis dan Indonesia.



Gambar 4.5 Presiden Joko Widodo menyambut Presiden Perancis Francois Hollande di Jakarta

Dari aspek pertahanan, hal ini berdampak pada CBM (*Confidence Building Measure*) antara kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa CBM yang terjalin baik antara kedua negara ini mengantarkan pada berbagai bentuk kerjasama yang terjadi, seperti di bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, industri pertahanan, sosial budaya

---

<sup>51</sup> Kementerian Pertahanan RI. 2016. Gelar MBBI ke 15 Kerjasama Pertahanan dengan Pendekatan Budaya. [Online] <https://www.kemhan.go.id/2016/11/08/gelar-mbbi-ke-15-kerjasama-pertahanan-dengan-pendekatan-budaya.html> Diakses pada 4 Februari 2019

---

<sup>52</sup> Situs resmi IFI <https://www.ifi-id.com/id#> Diakses pada 24 Juli 2018

(*people-to-people contacts*), dan penanganan pada dampak perubahan iklim. Kerjasama strategis tersebut terus terjalin hingga saat ini, bahkan pada Maret 2017 silam Francois Hollande selaku presiden Perancis yang menjabat pada saat itu melakukan pertemuan bilateral ke Jakarta dan bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen penguatan kerjasama khususnya di bidang ekonomi kreatif, pendidikan, maritim, pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable cities development*), energi, pertahanan dan infrastruktur.<sup>53</sup>

Selain Perancis, Cina merupakan negara mitra strategis Indonesia. Cina sendiri telah mengikuti program IACS sejak tahun 2006 hingga saat ini. Hubungan bilateral RI dengan Cina sendiri kini menjadi hubungan Kemitraan Strategis Komprehensif sejak tahun 2013. Meningkatnya perekonomian di kedua negara ini menjadi daya tarik warga kedua negara, baik di sisi perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, hingga budaya. Kerjasama pun terjalin, terutama

di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya<sup>54</sup>. Hal ini mengindikasikan tercapainya CBM diantara Indonesia dan Cina yang berujung pada kerjasama komprehensif. Keikutsertaan Cina dalam program IACS sejak tahun 2006 ini juga lah yang mampu berkontribusi untuk mendorong terciptanya CBM diantara Indonesia dengan Cina.

### **Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan yang berhasil dibentuk mengenai bagaimana peran program IACS sebagai Diplomasi Kebudayaan oleh Indonesia dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional.

- a. IACS membantu dalam membentuk citra positif Indonesia, yang selanjutnya akan dipancarkan ke dunia internasional. Sehingga akan terbentuk opini publik yang positif terhadap Indonesia. Opini publik yang positif tersebut diharapkan menjadi dukungan bagi upaya kebijakan politik yang dijalankan sehingga tercapai kepentingan nasional yang dicita-citakan.
- b. IACS mempererat hubungan bilateral maupun multilateral,

---

<sup>53</sup> Situs resmi Kementerian Luar Negeri RI. Hubungan Bilateral Perancis – Indonesia. [Online] <https://www.kemlu.go.id/paris/id/Pages/RI-France.aspx> Diakses pada 27 Juli 2018

---

<sup>54</sup> Buku Diplomasi Indonesia 2014 oleh Kementerian Luar Negeri RI

sehingga mendorong terjalinnya kerjasama yang menjadi salah satu poin dalam kepentingan nasional Indonesia.

- c. IACS berkontribusi pada realisasi sistem politik luar negeri bebas-aktif Indonesia.

Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan terkait dengan kontribusi yang diberikan IACS dalam pertahanan negara.

- a. Proses terjadinya *people to people contact* antara para peserta program IACS dengan masyarakat Indonesia setempat mendukung pertahanan negara.
- b. *People to people contact* tersebut akan meningkatkan kesepahaman antara pihak terkait, sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik.
- c. Dalam mendukung pertahanan negara, IACS mendukung salah satu kebijakan pertahanan 2018 oleh Kementerian Pertahanan, yakni memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Restorasi sosial disini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia tetap menjunjung tinggi dan tidak melupakan nilai-nilai luhur

kebangsaan, sehingga tidak kehilangan jati diri bangsanya.

- d. *Core activity* dari IACS dimana adalah *people to people contact* sejalan dengan inti dari CBM. Terutama di bidang *Socio-cultural CBMs*, yang menitikberatkan pada peningkatan aktifitas *people to people contact*.
- e. IACS berkontribusi dalam meningkatkan CBM Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga memungkinkan terjalinnya kerjasama lebih lanjut.

## **Rekomendasi**

### **Rekomendasi Teoretis**

Penelitian ini dapat dijadikan saran untuk pengembangan ilmu diplomasi pertahanan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan lebih luas mengenai unsur pertahanan, khususnya pertahanan nirmiliter. Diplomasi pertahanan yang pada awalnya sangat identik dengan pengerahan angkatan bersenjata, kini menjadi lebih luas maknanya. Diplomasi pertahanan merupakan segala metode serta strategi yang diterapkan oleh suatu negara dengan mengerahkan segala upaya di bidang ekonomi, budaya,

kerjasama politik serta kerjasama pertahanan.

Disamping itu, citra sebuah negara di dunia internasional dianggap sangat penting dan berperan dalam jalannya pemerintahan suatu negara. Citra suatu negara akan berdampak pada kelancaran upaya pencapaian kepentingan nasional negara tersebut. Untuk itu diharapkan selain penguatan kekuatan militer, pembentukan citra positif sebuah negara juga perlu terus digalakan.

IACS sebagai program dibawah Kementerian Luar Negeri dapat berperan dalam membentuk citra positif Indonesia di mata dunia. Untuk itu, adanya sinergitas yang baik antara kekuatan militer dan nonmiliter juga perlu dilakukan lebih komprehensif. Dalam buku putih pertahanan oleh Kementerian Pertahanan sendiri telah disebutkan mengenai kekuatan militer dan nonmiliter sebagai unsur pertahanan negara. Untuk itu, integrasi serta sinergitas dan kerjasama yang komprehensif diantara Kementerian Pertahanan dan Lembaga serta Kemeterian di luar bidang pertahanan diperlukan, sehingga tercipta sistem pertahanan semesta yang dicita-citakan. Dengan begitu, keamanan negara dan

seluruh masyarakat dapat lebih terjamin ditengah-tengah kondisi global yang dinamis.

### **Rekomendasi Praktis**

Kementerian Luar Negeri sebagai regulator serta pelaksana program IACS telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Memancarkan sistem nilai yang dianut Indonesia ke dunia internasional merupakan langkah yang baik. Penggunaan dimensi budaya sebagai bentuk diplomasi 'modern' dalam membentuk citra positif juga langkah yang perlu diapresiasi. Namun, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini.

Ditemukan bahwa salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program IACS yakni keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan IACS tiap tahunnya berdampak pada tingkat perkembangan program yang kurang optimal. Kuota jumlah peserta tiap tahunnya juga dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang disisihkan. Hal ini patut disayangkan, apabila melihat dari signifikansi program yang diberikan dalam membentuk citra positif dan menghasilkan *friends of Indonesia* di seluruh dunia. Untuk itu, diharapkan

agar Kementerian Luar Negeri berupaya untuk memperbesar skala dari program IACS ini, sehingga akan dihasilkan lebih banyak alumni-alumni, yang biasa disebut *friends of Indonesia*, di seluruh dunia. Alumni-alumni inilah yang diharapkan mampu menjadi kekuatan pertahanan Indonesia di luar negeri.

Selain itu, diharapkan dalam pelaksanaan program IACS ini Kementerian Luar Negeri dapat menjalin kerjasama dengan pihak *stakeholder* lain yang terkait. Kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dirasa dapat menjadi *partner* kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program IACS. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan program ini dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, dan mampu secara optimal mendukung kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia yang sedang dijalankan.

#### Daftar Pustaka

Aguilar, M. (1996). *Cultural Diplomacy and Foreign Policy: German-American Relationship*. New York: Peter Lang

Badan Pusat Statistik. [Online] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember->

[2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan-.html](#) Diakses pada 29 Juli 2018

Bakrie, C.R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

BBC Indonesia. (2018). Dampak Krisis Venezuela: Keluarga Tercerai Berai. [Online] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45368100> Diakses pada 13 Januari 2019

Bennet, L. (1995). *International Organization, Principle and Issue*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Cresswell, J. (2014). *“Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches”*. California: Sage Publication

DW. (2018). Diplomasi K-Pop Korea Selatan Yang Meriah Menggoyang Pyongyang. [Online] <https://www.dw.com/id/diplomasi-k-pop-korea-selatan-yang-meriah-menggoyang-pyongyang/a-43224685> Diakses pada 24 Juli 2018

Jackson, W. (1995). *Approaches to Methods*. Scarborough: Prentice-Hall Canada

Efendi, T.D. (2011). *Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Glosserman, B. (2005). *Cross-Strait Confidence Building Measures*. Honolulu: Issues & Insights

Holsti, K.J. (1984). *International Politics, A Framework for Analysis Third Edition*. New Delhi: Prentice

Huberman, M. dan Miles, M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*

- Sourcebook. California: SAGE Publication
- IFI (Institut Francais Indonesia) <https://www.ifi-id.com/id#> Diakses pada 24 Juli 2018
- Jackson, W. (1995). *Approaches to Methods*. Scarborough: Prentice-Hall Canada
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Buku Diplomasi Indonesia 2014*
- Kementerian Luar Negeri RI. Hubungan Bilateral Perancis – Indonesia. [Online] <https://www.kemlu.go.id/paris/id/Pages/RI-France.aspx> Diakses pada 27 Juli 2018
- Kementerian Luar Negeri RI. (2017). *2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship*. [Online] <https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/2018-Indonesian-Arts-and-Culture-Scholarship.aspx> Diakses pada 20 Juli 2018
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*
- Kementerian Pertahanan RI. (2016). Gelar MBBI ke 15 Kerjasama Pertahanan dengan Pendekatan Budaya. [Online] <https://www.kemhan.go.id/2016/11/08/gelar-mbbi-ke-15-kerjasama-pertahanan-dengan-pendekatan-budaya.html> Diakses pada 4 Februari 2019
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Kementerian/Lembaga Menjadi Unsur Utama Menghadapi Ancaman Pertahanan Nirmiliter* [Online] <https://www.kemhan.go.id/2015/06/12/kementerianlembaga-menjadi-unsur-utama-menghadapi-ancaman-pertahanan-nirmiliter.html> Diakses pada 13 Januari 2019
- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/ 1008 /M/ V /2017 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/02/LAMPIRA-N-JAKHANNEG-2018-FINAL.pdf> pada 1 Januari 2019
- Komeini, Y. (2009). *Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Tenggara dan Stagnasi Postur Pertahanan Indonesia Periode 2001-2004*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Kurnia, M. (2015). *Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan Indonesia*. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi
- Lerche, C.O. dan Said, A.A. (1964). *The Concept of International Politics*. New Jersey: Prentice
- Li dan Karakowsky. (2001). "Do We see eye-to-eye? Implication of Cultural Differences for Cross-Cultural Management Research and Practice". *The Journal of Psychology*
- Macintas, D.A. (2018). *Dampak Krisis Ekonomi Venezuela Tahun 2016 Terhadap Kerjasama Bilateral Tiongkok – Venezuela*. Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta
- Majie, Z. 2002. "The Role of Soft Power in International Relations".

- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*
- Mulloy, G. (2007). *Japan's Defense Diplomacy and "Cold Peace" in Asia*. Asia Journal of Global Studies
- Nye, J. (2008). *Public Diplomacy and Soft Power*. SAGE Journals
- Pedrasan, R. "ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community". Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Institut Fur Politische Wissenschaft
- Potensi Pariwisata Indonesia. [Online] <http://indonesia.go.id/in/potensi-daerah/pariwisata> Diakses pada 27 Juli 2018
- Roy, S.L. (1995). *Diplomasi*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada
- Sinambela, A. (2007). *Penjelasan Umum Mengenai Blue Print, Arah, dan Strategi Diplomasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Jakarta: Proceeding Bank Indonesia
- Situs Resmi Presiden RI. 2017. *Jalin Hubungan Lewat People to People Contact*. [Online] <http://presidenri.go.id/berita-aktual/jalin-hubungan-lewat-people-to-people-contact.html> Diakses pada 4 Februari 2019
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Watson, A. (1984). *The Dialogues Between States*. London: Methuem
- Wibisono, M., Legionosuko, T., dan Yunida, E. (2017). *Peran Diaspora dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus Diaspora Indonesia di Belgia)*. Jurnal Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan
- Wulandari, I. (2015). *Diplomasi Budaya Indonesia Masih Rendah*. [Online] <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/29/nwymzy346-diplomasi-budaya-indonesia-masih-rendah> Diakses pada 20 Juli 2018